

Laporan Bulanan

**POKJA PAPUA CERDAS
BP3OKP RI Wilayah Provinsi Papua Barat**

Juli 2025

Sekretariat BADAN PENGARAH PAPUA



CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-1

Dokumentasi Kegiatan Strategis



Photo: Workshop Akselerasi Akses Layanan Pendidikan Gratis di Papua Barat

Peserta Diskusi:

- BPP RI Provinsi Papua Barat
- Ka Kanwil DJPb PB
- Dinas Pendidikan PB
- Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari
- MKKS SMA/SMK, SMP, dan SD
- Biro Otsus PB
- Rektor Unipa
- Ombudsman PB
- Forum PKBM

Selasa, 1 Juli 2025, Bertempat di Aula Kasuari GKN Arfai Manokwari Papua Barat telah dilaksanakan workshop **Akselerasi Akses Layanan Pendidikan Gratis di Papua Barat**. Tujuan dilaksanakan workshop yaitu, mendiskusikan dan merumuskan kesepakatan bersama berkenaan dengan Isu Pendidikan Gratis, yang saat ini menjadi viral di kalangan masyarakat Papua Barat. Workshop tersebut telah menghasilkan beberapa hal penting dan telah didokumentasikan dalam Berita Acara diantaranya:

- Skema pelaksanaan Program Pendidikan Gratis, perlu dipersiapkan dengan baik dan komprehensif sebelum program tersebut diluncurkan oleh Pemerintah Daerah;
- Data terpilah sektor pendidikan di Papua Barat perlu disiapkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah, untuk dijadikan rujukan penyusunan anggaran terkait Program Pendidikan Gratis.
- Perlu dibentuk Tim Task Force atau SATGAS tingkat Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat, yang bertugas menyusun draft regulasi yang memuat skema Program Pendidikan Gratis, dan Pendidikan Lainnya yang akan dibahas berjenjang, sehingga skema dan /atau petunjuk teknis pelaksanaannya dapat memperkecil adanya potensi bias saat implementasi Program tersebut.

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-2

Dokumentasi Kegiatan Strategis



Photo: Workshop Akselerasi Akses Layanan Pendidikan Gratis di Papua Barat

Peserta Diskusi:

- Asosiasi PT Swasta se-Tanah Papua
- Pimpinan PT Negerii se-Tanah Papua
- BPP/BP3OKP Papua Barat
- Gubernur Papua Barat Daya
- Pimpinan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV

Selasa-Rabu (3-4 Juli 2025), Bertempat di Hotel Vega Kota Sorong Papua Barat Daya telah dilaksanakan Rapat Kerja Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) di Tanah Papua. Tujuan dilaksanakan workshop yaitu, Mewujudkan Perguruan Tinggi Berdampak di Tanah Papua melalui Peningkatan Mutu Tri Dharma PT di era Otsus Papua. Kehadiran BPP/BP3OKP Papua Barat yaitu melakukan fungsi SHEK (koordinasi) dengan PT, berkenaan dengan Prioritas Program Papua Cerdas yang menjadi kewenangan Provinsi. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal, diantaranya:

- Peningkatan SDM Tenaga Dosen/Pengajar tingkat Magister dan Doktor;
- Pembinaan dan Pelatihan Teknis penyusunan Angka Kredit Dosen guna Pengusulan jabatan fungsional
- Peningkatan Dosen PTS menjadi ASN (PNS dan P3K).
- Dukungan pembiayaan peningkatan kapasitas mahasiswa OAP, pengembangan UMKM, dan penambahan kuota KIP;
- Dukungan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, teknologi informasi, dan peralatan praktikum.

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-3

Dokumentasi Kegiatan Strategis



Photo: Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah se- Tanah Papua

Peserta Diskusi:

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
- Pemerintah Provinsi Papua
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Tanah Papua
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua
- BPMP se- Tanah Papua
- Wahana Visi Indonesia
- UNICEF

Senin-Rabu, 7-9 Juli 2025, Bertempat di Hotel Horizon Ultima Entrop Jayapura Papua, telah dilaksanakan pertemuan **Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah & Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu di Tanah Papua**. Tujuan umum pertemuan yaitu penyatuan visi, misi, strategi, dan langkah nyata antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di Tanah Papua. Kehadiran BPP/BP3OKP Papua Barat bertujuan mendorong dan memastikan Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Layanan Pendidikan terdokumentasi dan terintegrasi sebagai prioritas pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Konsensus penting yang dihasilkan, diantaranya:

- Regulasi kewenangan pengelolaan Pendidikan di Tanah Papua antara pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Pemerataan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pengelolaan PPPK guru.
- Implementasi kurikulum dan pembelajaran khas yang mengadopsi kultur daerah Papua dan tidak bisa disamakan dengan daerah luar Papua
- Kompetensi calistung (baca, tulis dan hitung) siswa Papua, dan
- Pemerataan kesempatan/akses Pendidikan bagi ATS (Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah)

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-4

Dokumentasi Kegiatan Strategis



Photo: Rapat Koordinasi Teknis Dinas Pendidikan se-Papua Barat

Peserta Diskusi:

- Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat
- Dinas Pendidikan se-Kabupaten di Papua Barat
- BPP/BP3OKP Papua Barat

Kamis-Sabtu, 24-26 Juli 2025, bertempat di Swissbel Hotel Manokwari Papua Barat dilaksanakan **Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten se-Papua Barat**. Kehadiran BPP/BP3OKP Papua Barat pada RAKORNIS tersebut yaitu mendorong dan memastikan Program Percepatan pada Misi Papua Cerdas yang menjadi kewenangan Provinsi (Pengembangan Sekolah Terbuka, Pengembangan Sekolah Berpola Asrama, dan Akselerasi Akses dan Mutu Layanan Pendidikan) harus terintegrasi, tersinkronisasi, dan harmonis dengan rencana kerja sektoral Dinas Pendidikan di era Otonomi Khusus Papua. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga hal utama, yaitu:

- Peningkatan Mutu Pendidikan, melalui upaya peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi;
- Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran, diantaranya melalui pemutakhiran data terpilah, penyaluran beasiswa, dan bantuan seragam gratis bagi siswa/I SMA dan SMK yang kurang mampu;
- Tata Kelola dan Kerjasama, melalui sinkronisasi program, penguatan tata kelola, kerjasama dengan pihak terkait



Terima Kasih



LAPORAN BULANAN JULI - 2025 BPP/BP3OKP RI PERWAKILAN PAPUA BARAT

KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT

1. Muga Romanus, SH
2. dr. Feliks Duwit, M.Sc, MPH, Sp.PD



02 AGUSTUS 2025





BADAN PENGARAH PAPUA

POKJA PAPUA SEHAT - JULI 2025

KEGIATAN STRATEGIS

Umur Harapan
Hidup (UHH)

68,47

Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52



Prevalensi
Stuntin

13,97%

Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00



Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota

Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A



Indeks Pembangunan
Manusia

67,69%

Baseline (2022): 65,89
Target (2024): 66,81

MUSRENBANG RKPD, MUSRENBANG OTSUS & FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025. Bersama Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Wakil Bupati Kab. Teluk Bintuni, Kakanwil DJPb Papua Barat, Anggota BP3OKP PB, Anggota POKJA Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif BP3OKP PB, Kepala Bappeda Prov. PB, Dandim Kab. Teluk Bintuni, Kapolres Kab. Teluk Bintuni, Tokoh Masyarakat dan DAP DPRD Kab. Teluk Bintuni, OPD se Kab. Teluk Bintuni, Kepala BPS Teluk Bintuni



HASIL KEGIATAN

Pada tanggal 7 Juli 2025 BP3OKP menghadiri undangan dan turut serta mengawal kegiatan MUSRENBANG RKPD, MUSRENBANG OTSUS & FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025. Tujuan utama Musrenbang adalah mensinergikan program dan kegiatan dari berbagai distrik dengan prioritas pembangunan daerah agar sesuai dengan visi dan misi bupati dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Pokja Papua Sehat menegaskan kembali Program pelayanan kesehatan bergerak dalam RAPPP telah diprogramkan melalui kegiatan Musrenbang RKPD kabupaten Teluk Bintuni.

BP3OKP, Ibu Irene Manibuy, menegaskan peran lembaganya dalam mensinkronkan dan mengharmonisasi perencanaan Otsus dengan dokumen RKPD. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dari tingkat kampung dalam Musrenbang untuk memastikan program-program yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil. Ibu Irene juga menyoroti keterlambatan dalam penyelesaian Rencana Anggaran Program (RAP) yang menghambat pencairan dana Otsus, dan mendesak OPD terkait untuk segera melengkapi persyaratan dokumen syarat salur agar dana dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

KESIMPULAN

Peran dan Tantangan BP3OKP

- BP3OKP memiliki peran krusial dalam mengawal dan mempercepat pembangunan Papua, terutama melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Otsus.
- BP3OKP dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 68A karena kegagalan pembangunan selama 20 tahun sebelumnya, dan bertujuan untuk memastikan dana Otsus dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan OAP.
- Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) setebal 1.917 halaman berisi matriks program dan anggaran yang harus menjadi acuan bagi semua program Otsus.
- Kepala BP3OKP, Ibu Irene, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mencapai target pembangunan, serta mendorong OPD agar tidak membuat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tindak-Lanjut

1. Seluruh OPD di Kabupaten Teluk Bintuni harus memastikan bahwa semua program yang diusulkan selaras dengan RAPPP 2025-2029, jika tidak, program tersebut akan ditolak oleh sistem informasi.
2. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa Musrenbang Otsus berjalan secara partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta melibatkan semua pemangku kepentingan seperti adat, legislatif, dan masyarakat sipil.
3. OPD didorong untuk tidak menetapkan APBD jika RAP dan RKPD belum selesai disesuaikan, untuk menghindari masalah di kemudian hari.
4. Kepala BPS berharap dapat berkolaborasi dengan OPD untuk sinkronisasi data guna memastikan validitas data sektoral yang dihasilkan selama setahun.
5. BP3OKP akan mengusulkan tindakan administratif, termasuk pemotongan dana, jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan dana Otsus.



BADAN PENGARAH PAPUA

POKJA PAPUA SEHAT - JULI 2025

KEGIATAN STRATEGIS

Umur Harapan
Hidup (UHH)

68,47

Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52



Prevalensi
Stuntin

13,97%

Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00



Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota

Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A



Indeks Pembangunan
Manusia

67,69%

Baseline (2022): 65,89
Target (2024): 66,81

DESK MUSRENBANG OTSUS PAPUA SEHAT 2026. Bersama Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Sosial



HASIL KEGIATAN

Pada tanggal 8-9 Juli 2025 Pokja Papua Sehat BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat terlibat langsung mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam penyusunan Program Kesehatan pada kegiatan DESK MUSRENBANG OTSUS PAPUA SEHAT 2026. Pokja Papua Sehat memastikan Program pelayanan kesehatan bergerak dan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam RAPPP 2025-2029 Kabupaten Teluk Bintuni telah diprogramkan.

Masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama meliputi TBC, HIV/AIDS, kanker payudara, kusta, dan kurangnya pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat asli Papua. BP3OKP Provinsi Papua barat dalam hal ini POKJA Papua Sehat mengusulkan dan memastikan Program "**Kartu Papua Sehat**" untuk mengatasi pembatasan-batasan akibat regulasi BPJS antara lain Obat, Bahan medis habis pakai, transportasi dan lain-lain, pengobatan di luar gedung, dan pengoperasian kembali **kapal rumah sakit terapung**. Bupati dan Wakil Bupati juga diharapkan fokus pada pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, usia harapan hidup, prevalensi stunting, dan penanganan TB serta malaria

Peran BP3OKP

BP3OKP Perwakilan Papua Barat, POKJA Papua sehat bertanggung jawab mendampingi dari perencanaan hingga evaluasi.

- POKJA Papua Sehat memastikan bahwa program yang diusulkan oleh OPD dalam penyusunan program sudah sesuai rencana Aksi Pembangunan Papua 2025-2029.
- POKJA Papua Sehat Dr. Felix dan Muga Romanus telah mengunjungi berbagai tempat di Bintuni meninjau langsung pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Pustu serta Dinas Kesehatan Kab. Teluk Bintuni

Usulan dan Rekomendasi

Program Kesehatan dan Infrastruktur

- ❖ Diusulkan pelayanan Kesehatan diluar Gedung untuk pencegahan penyakit, menemukan penyakit dan pengobatan dini.
 - Tim dokter dan perawat harus aktif mendatangi masyarakat di desa-desa.
 - Kartu Papua Sehat diusulkan untuk membantu OAP sebagai penerima Bantuan Iuran(PBI).
- ❖ Pengoperasian *Rumah Sakit Terapung* menjadi prioritas untuk wilayah pesisir.
 - Tujuan utamanya adalah mengobati OAP yang tidak memiliki akses ke Puskesmas.
 - Harus dipastikan anggaran Pengoperasian rumah Sakit Terapung, baik dari kabupaten, Provinsi maupun K/L..
- ❖ Kebutuhan akan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung akses Kesehatan.
 - Aksesibilitas ke desa dan distrik sangat penting agar masyarakat dapat menjangkau puskesmas maupun rumah sakit.
 - Pembangunan jalan dan jembatan harus segera dilakukan.

POKJA PAPUA SEHAT KEGIATAN BERSAMA

01



Undangan FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik Sekaligus dan Tahap I TA 2025

02



SHEK bersama Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak membahas TKD kabupaten Pegunungan Arfak

03



Peningkatan Kapasitas Pokja BPP dan pembekalan Monev Laporan Otsus

04



Rapat Koordinasi Penyelesaian Pemalangan dan Hak Adat hasil hutan di atas tanah adat Kuri

PENCAPAIAN PROGRAM PAPUA SEHAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

PENCAPAIAN PROGRAM PAPUA SEHAT

A. Indikator Pembangunan Kesehatan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- IPM Teluk Bintuni mencapai 69,99%, lebih tinggi dibanding rata-rata Papua Barat
- Menunjukkan peluang untuk mencapai kategori IPM tinggi dengan intervensi yang tepat
- Peningkatan umur harapan hidup menunjukkan tren positif 69,99%,

2. Indikator Demografi dan Kesehatan

- Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 39-40 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025
- Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,36 menunjukkan kontrol kelahiran yang relatif baik
- Rasio ketergantungan terendah 36,20% pada tahun 2024-2025 menciptakan bonus demografi
- Rumah tangga layak huni mencapai 2,68% dengan akses air bersih dan sanitasi layak

B. Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan

1. Ketersediaan Fasilitas

- Tersedia RSUD, Puskesmas, dan Pustu di berbagai distrik
- Alat kesehatan dasar tersedia di setiap Puskesmas dan Pustu meskipun jumlahnya sangat terbatas.
- Program ambulans dan speedboat untuk rujukan medis sudah mulai anggarkan

2. Program Inovatif

- Rencana pengoperasian rumah sakit terapung untuk wilayah pesisir telah dianggarkan
- Program Kartu Papua Sehat diusulkan untuk menutupi celah BPJS
- Pelayanan kesehatan di luar gedung mulai dilakukan untuk menjangkau daerah terpencil

C. Penanganan Penyakit Prioritas

1. Program Penanganan Stunting

- Tim penanganan stunting khusus sudah terbentuk dengan koordinasi lintas sektor
- Dinas Sosial telah mengalokasikan untuk penanganan stunting.
- Program bantuan sembako dan susu difokuskan pada 3 Puskesmas dan 5 distrik prioritas
- Program makanan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan ibu menyusui sudah berjalan

2. Identifikasi dan Penanganan Penyakit

- Berhasil mengidentifikasi penyebaran HIV/AIDS ke populasi anak sekolah
- Deteksi kembali munculnya penyakit kusta setelah dinyatakan habis tahun 1995
- Program eliminasi malaria dan penanganan TB menjadi fokus prioritas

TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH KABUPATEN TELUK BINTUNI

TANTANGAN YANG DIHADAPI

A. Akses dan Aksesibilitas

- Rendahnya pemanfaatan Puskesmas oleh Orang Asli Papua (OAP) karena kendala transportasi
- Biaya transportasi mahal membuat masyarakat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan
- Kondisi geografis pesisir dan pegunungan menjadi tantangan distribusi layanan kesehatan

B. Pembiayaan Kesehatan

- Sistem BPJS tidak sepenuhnya mencakup kebutuhan OAP
- Biaya obat dan transportasi rujukan tidak ditanggung BPJS
- Dana Otsus terbatas dengan alokasi 20 miliar rupiah untuk seluruh program kesehatan

C. Infrastruktur Dasar

- Masalah air bersih di Distrik Arandai menyebabkan penyakit kulit dan malaria endemik
- Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan masih terbatas untuk akses ke fasilitas kesehatan
- Ketersediaan tenaga medis yang memadai masih menjadi kendala

REKOMENDASI POKJA PAPUA SEHAT UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

REKOMENDASI STRATEGIS

A. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan

1. Implementasi Program Inovatif

- Segera merealisasikan pembangunan kapal rumah sakit terapung untuk wilayah pesisir
- Mempercepat implementasi program Kartu Papua Sehat sebagai pelengkap BPJS
- Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di luar gedung dengan tim dokter dan perawat keliling
- Menyediakan ambulans laut dan speedboat untuk rujukan medis darurat

2. Penguatan Infrastruktur Kesehatan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas alat kesehatan di setiap Puskesmas dan Pustu
- Membangun Pustu di Distrik Yakora sebagai prioritas karena fungsinya sebagai sentral pelabuhan
- Rehabilitasi fasilitas kesehatan yang rusak, terutama ambulans di Moskona Barat
- Memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai di seluruh fasilitas kesehatan

B. Penanganan Masalah Kesehatan Prioritas

1. Program Air Bersih dan Sanitasi

- Mengalokasikan anggaran hingga 20 miliar rupiah untuk sistem penyediaan air bersih komprehensif
- Melakukan studi kelayakan mendalam untuk pembangunan sistem air bersih di Distrik Arandai
- Membangun penampungan air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah di Distrik Kamundan
- Memanfaatkan sumber air terjun dengan survei dan perencanaan yang matang

2. Intensifikasi Penanganan Stunting

- Memperluas program makanan bergizi ke seluruh distrik, tidak hanya 5 distrik prioritas
- Meningkatkan koordinasi tim penanganan stunting dengan melibatkan semua OPD terkait
- Mengintegrasikan program makanan bergizi di sekolah untuk meningkatkan minat belajar anak
- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data by name by address

3. Pengendalian Penyakit Menular

- Memperkuat program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS
- Mengamankan pasokan obat kusta dan memperluas cakupan pengobatan
- Mengintensifkan program eliminasi malaria terutama di daerah endemik
- Meningkatkan program penanganan TB dengan pendekatan berbasis komunitas

C. Penguatan Sistem dan Tata Kelola

1. Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran

- Memastikan semua program kesehatan selaras dengan RAPPP 2025-2029
- Mempercepat penyelesaian dokumen RAP, KAK, dan DIPD untuk kelancaran pencairan dana Otsus
- Mengoptimalkan koordinasi antara BP3OKP, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait
- Melakukan sinkronisasi data dengan BPS untuk validitas data sektoral kesehatan

2. Partisipasi Masyarakat dan Edukasi

- Meningkatkan sosialisasi program Kartu Papua Sehat kepada masyarakat OAP

3. Penguatan Kapasitas SDM

- Meningkatkan ketersediaan tenaga medis di Puskesmas dan Pustu daerah terpencil
- Memberikan insentif khusus untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil
- Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan lokal
- Membangun rumah tinggal tenaga kesehatan di lokasi strategis

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Sistem Pemantauan Berkelanjutan

- Mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk monitoring real-time
- Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program Papua Sehat
- Memastikan pelaporan yang akuntabel dan transparan dalam penggunaan dana Otsus
- Mengimplementasikan sanksi administratif termasuk pemotongan dana untuk pelanggaran

2. Target dan Indikator Kinerja

- Menetapkan target spesifik untuk peningkatan IPM, penurunan AKB, dan usia harapan hidup
- Mengembangkan indikator kinerja yang terukur untuk setiap program kesehatan
- Melakukan benchmarking
- Memastikan pencapaian target eliminasi malaria dan penanganan stunting sesuai timeline nasional

KESIMPULAN

Program Papua Sehat di Kabupaten Teluk Bintuni telah menunjukkan beberapa pencapaian positif, terutama dalam hal IPM yang lebih tinggi dari rata-rata Papua Barat dan tren peningkatan umur harapan hidup. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam hal akses layanan kesehatan untuk OAP, infrastruktur dasar seperti air bersih, dan penanganan penyakit prioritas.

Rekomendasi strategis yang diusulkan memerlukan komitmen dan koordinasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, alokasi anggaran yang memadai, dan implementasi yang konsisten. Keberhasilan program Papua Sehat akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan pendekatan top-down melalui kebijakan strategis dengan pendekatan bottom-up melalui partisipasi masyarakat yang aktif.

Dengan implementasi rekomendasi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Teluk Bintuni dapat mencapai target pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.



TERIMA KASIH

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA PRODUKTIF
BP3OKP Perwakilan Papua Barat



KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

21,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,13%

Baseline (2022): 5,37
Target (2024): 4,24-4,95



Realisasi Investasi

Rp8,07 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M
Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T



Sumber Data: RPPPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)



Kegiatan **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)** RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni di dilaksanakan pada tanggal **07 Juli 2025, Jam 09.00 WIT** s.d selesai di **Aula Sasana Karya Kantor Bupati SP 3, Distrik Menimeri**. BP3OKP-PB juga di undang untuk menyampaikan beberapa hal terkait arah kebijakan pembangunan di kabupaten Teluk Bintuni ke depannya.

Irene Manibuy selaku Anggota BP3OKP-PB juga menyampaikan bahwa sudah di louncing **Kartu Papua Barat Sehat, Kartu Papua Barat Cerdas dan Kartu Papua Barat Produktif** oleh bapak Gubernur Papua, Kami berharap bapak Bupati Kab, Teluk Bintuni juga mempunyai visi yang sama sehingga arah pembangunan di tanah Papua benar-benar menyentuh masyarakat kabupaten Teluk Bintuni terlebih khusus Orang Asli Papua (OAP). **Irene Manibuy** juga berharap OPD teknis lebih giat dan bekerja keras sehingga dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

Pada Tanggal **8 Juli 2025, Pokja Papua Produktif, BP3OKP BP** di undang dalam kegiatan Musrenbang Otsus kabupaten Teluk Bintuni di kantor BAPPEDA Bintuni. Pokja Papua Produktif juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan musrenbang otsus, mulai dari perencanaan, Pengawasan hingga pada Pelaporan.

Pokja Papua Produktif oleh **Lalu Suprapta** dalam penyampainya bahwa BP3OKP-PB dalam tugas pengawasan dana otsus dalam musrenbang otsus untuk memastikan bahwa penggunaan dana otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Transparan, dan Akuntabel, serta diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang di jabarkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) per lima tahun. Musrenbang Otsus tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah/OPD Teknis, DPRD, Inspektorat dan Masyarakat.

1



SHEK bersama Bupati Kab. Pegunungan Arfak membahas TKD kabupaten Pegunungan Arfak



2

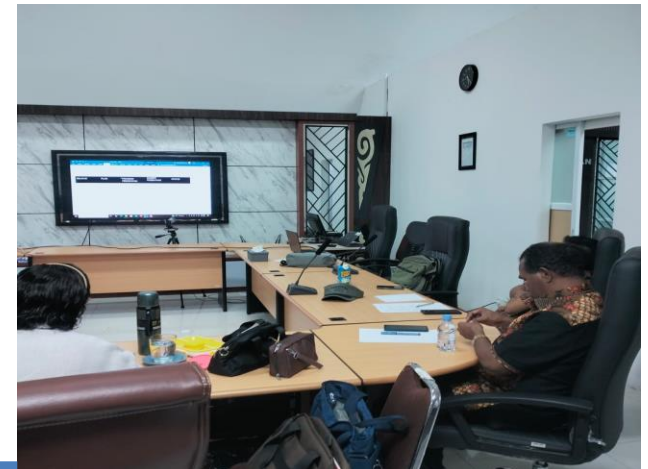


Rapat Internal Pokja dan Anggota BP3OKP Papua Barat, membahas terkait Kinerja Pokja dan Pelaporan



Pada hari selasa, tanggal 29 Juli 2025 bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari Lt. III, BP3OKP PB melaksanakan pertemuan dengan Kepala suku Kuri Wamesa serta masyarakat adat dan pemilik hak ulayat, membahas terkait Tuntutan ganti rugi kepada PT. Wijaya SENTOSA atas kerusakan hutan di atas tanah adat.

3



CAPAIAN DAN REKOMENDASI



1. Beberapa capaian dalam musrembang RKPD Kabupaten Bintuni di antaranya:

- Indeks Pembangunan Manusia kabupaten teluk Bintuni sudah di atas angka Provinsi
- Gender di papua barat, kabupaten teluk Bintuni sudah bagus
- laju pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat kemiskinan juga tinggi, kami juga berharap kepada Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten teluk Bintuni berupaya mendokrat hal tersebut melalui; meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan sehingga mengurangi angka kemiskinan.

2. CAPAIAN DALAM MUSREMBANG OTSUS KABUPATEN TELUK BINTUNI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Kebanyakan program yang di usulkan mengarah pada pembangunan daerah dan masyarakat adat papua
- Usulan program tentu di sesuaikan dengan komoditas unggulan yang perlu di kembangkan di kabupaten teluk Bintuni.

3. Kunjungan Bupati kabupaten Pegunungan Arfak ke Kantor BP3OKP Papua Barat sebagai salah satu upaya untuk hubungan Kerjasama antara

BP3OKP PB dan Kab. Pegunungan Arfak demi kemajuan kabupaten fak-fak dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

4. Adanya Kesepakata bersama antara BP3OKP PB dan Kepala Suku Kuri Wamesa serta masyarakat meliputi:

- POKJA Papua Produktif segera mengundang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan serta menyikapi persoalan tersebut.
- Pokja Papua Produktif akan memediasi Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat dan masyarakat adat/pemilik hak ulayat untuk melihat persoalan tersebut
- Selanjutnya Pokja Papua Produktif akan menyampaikan/melaporkan kepada Kepala BP3OKP Perwakilan Papua Barat (Irene Manibuy) Agar segera memediasi Pihak Perusahaan Kayu (PT Wapoga Mutiara Timber, PT Wijaya Santosa dan perusahaan kayu lainnya) dan Pemerintah Provinsi papua Barat (Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan) dan Pemilik Hak ulayat/ Masyarakat adat, sehingga boleh dapat melihat persoalan dengan baik sehingga tidak merugikan satu pihak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

- **Pelatihan dan Keterampilan:** Adakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif.

Pengembangan Ekonomi Lokal

- **Pertanian dan Perikanan:** Dorong pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, dengan fokus pada produk unggulan daerah. Berikan dukungan teknologi, akses pasar, dan permodalan.
- **Pariwisata:** Kembangkan potensi pariwisata alam dan budaya yang unik di Bintuni. Perhatikan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata.
- **Industri Kreatif:** Fasilitasi pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional.
- **Infrastruktur:** Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi.

Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

- Lestarkan budaya lokal dan ciptakan ruang bagi ekspresi budaya masyarakat

Pengelolaan Sumber Daya Alam Bijaksana

- **Migas:** Pastikan pengelolaan sumber daya migas (minyak dan gas) memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat. Perhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap kegiatan.
- **Perikanan dan Kelautan:** Kembangkan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, dengan menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir. Terapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- **Hutan:** Kelola hutan secara lestari, cegah deforestasi, dan lestarikan keanekaragaman hayati. Libatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan.

REKOMENDASI UMUM

1

Kabupaten Teluk Bintuni, yang terletak di Papua Barat, dikenal sebagai daerah penghasil migas, khususnya di ladang gas Tangguh. Selain itu, kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang menarik. Dengan demikian potensi tersebut perlu di maksimalkan sehingga menambah nilai jual baik di pasar nasional maupun manca negara.

3

Perlu Kerjasama yang secara terstruktur antara Pemerintah Daerah, sampai Pemerintah Kampung sehingga kebutuhan-kebutuhan yang merupakan kebutuhan Mendasar Masyarakat boleh terakomodir dalam musrembang.

2

Perlu adanya kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat asli Papua, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) menjadi alat penting dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembangunan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Teluk Bintuni.

TERIMA KASIH | BPP Papua Produktif



PERIODE JULI 2025

Laporan Pokja Papua Polhukam (Papua Damai)

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus

Provinsi Papua Barat







RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) BP3OKP Provinsi Papua Barat sesuai sistem Perencanaan Nasional dan Daerah, maka Anggota BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai telah berpartisipasi sebagai pengawal dan pendamping Musrenbang Reguler dan Musrenbang Otonomi Khusus yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat pada Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di Hotel Aston Niu dan Vitta Niu Hotel di Manokwari.

Pelaksanaan SHEK dilakukan secara lintas sektor dan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampuh sebagai Penerima Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus baik di Kabupaten maupun di Provinsi yang diawali dengan Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Perencanaan Daerah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Anggota BP3OKP bersama Anggota Pokja telah berinisiatif sesuai tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyusunan Dokumen RPJMD dan RKPD di tingkat provinsi dan kabupaten. Ada beberapa kabupaten yang belum dikunjungi oleh BP3OKP guna memberikan Arahan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi sehingga fungsi SHEK belum dilakukan secara inklusif dan akomodatif, namun telah diagendakan akan dilaksanakan pada awal Bulan Agustus 2025 terutama di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Secara khusus untuk Pokja Papua Politik, Hukum dan Keamanan pada Bulan Juli 2025 telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagaimana didiskripsikan berikut ini :



Kegiatan Pokja Papua Polhukam



Pengobatan Gratis & Donor Darah



Release Film Believe Kodam XVIII/Ksr

Kamis, 24 Juli 2025

Kamis, 24 Juli 2025, Kol. Inf. Jimmy Rihi Tugu selaku Anggota Pokja Papua Politik, Hukum dan Keamanan (Papua Polhukam) juga selaku Asisten Wilayah Teritorial Kodam XVIII Kasuari Papua Barat menyelenggarakan **Bakti Kesehatan Berupa Pengobatan Gratis dan Donor Darah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat..** Pelaksanaan Bhakti Kesehatan melibatkan sejumlah tenaga Kesehatan seperti Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kesda XVIII Kasuari dan PMI Papua Barat. **Kegiatan dilaksanakan guna membantu memenuhi kebutuhan stok darah khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Seluruh kantong darah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan diserahkan kepada pihak PMI untuk disimpan di Bank Darah agar dipergunakan sebaik mungkin.** Selain melaksanakan kegiatan donor darah juga melaksanakan **Panggung Budaya** sebagai bentuk Pendekatan Humanis yang merupakan salah satu pendekatan untuk pembangunan yang paling efektif dalam membangun Tanah Papua. Sehingga untuk membangun Kekuatan sebuah bangsa terletak pada kebersamaan yang dibangun oleh Masyarakat. **Dalam semangat mempererat hubungan antara TNI dan rakyat, Kol. Inf. Jimmy Rihi Tugu bersama Kodam XVIII Kasuari menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film “Believe – Takdir, Mimpi dan Keberanian” yang sebelumnya dirangkai dengan bakti kesehatan gratis dan panggung budaya.** Acara tersebut berlangsung meriah dan penuh kehangatan, menjadi simbol kedekatan tanpa sekat antara prajurit dan masyarakat. **Pesan moral film ini mengangkat nilai keberanian, pengabdian, dan harapan bagi generasi muda Papua.** Film Believe berkisah tentang Agus, seorang pemuda yang kehilangan arah setelah ditinggal ibunya dan kematian ayahnya, Dedi, seorang prajurit yang bertugas dalam Operasi Seroja tahun 1975. Kematian Dedi menjadi titik balik bagi Agus dalam menapaki jalan hidup sang ayah, melewati konflik batin dan pertemuan tak terduga dengan musuh lama ayahnya, Miro. Film ini diadaptasi dari buku biografi Jenderal TNI Agus Subiyanto berjudul Believe – Faith, Dream and Courage, karya Valent Hartadi, dan tayang perdana pada 24 Juli 2025. Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, S.Hub.Int., M.H.I., yang hadir bersama Forkopimda Papua Barat, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan cinta TNI kepada masyarakat.



Aster Kasdam XVIII/Kasuari sekaligus Anggota Pokja Papua Damai melaksanakan Penyiapan Integrated Farming di Warmare pada Juli 2025 dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Nasional sekaligus memimpin pembuatan integrated Farming seluas 10 hektar di tanah milik Kodam di Kampung Gueintuy Manokwari. Lahan ini akan menjadi demonstration plot untuk para petani, siswa/pelajar untuk tempat belajar. Kodam juga mengajak mahasiswa Polbangtan Manokwari terlibat memberi asistensi teori kepada para prajurit yg mengerjakan lahan. **Lahan akan ditanami berbagai jenis Tanaman dan Hewan Misalnya Hortikultura, Nanas Pegaf, Padi, Jagung berbagai jenis, Pepaya California, Semangka berbagai jenis, Peternakan Kambing, Ayam Petelur, Konservasi Kasuari** untuk menjamin kelangsungan hidup hewan endemik. Kedepan, akan melibatkan warga Kampung untuk pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat setempat meningkat.

[illegible]

Kegiatan Strategis Bersama



Selasa, 01 Juli 2025 BP3OKP Papua Barat melaksanakan **Workshop Akselerasi Akses Layanan Pendidikan Gratis di Provinsi Papua Barat**, yaitu “**Upaya Percepatan Implementasi Keberpihakan Bagi Masyarakat Papua Barat Yang Terdampak Biaya Masuk Sekolah**”. Pentingnya regulasi yang mengatur tentang Kewenangan. SMA/SMK/ sederajat menjadi kewenangan provinsi namun tidak diatur secara rinci dpada PP 106 Tahun 2021. Mengingat pemerintah kabupaten menangani PAUD/TK, SD, SMP/SLTP ditambahkan beban SMA/ sederajat terutama Pendidikan advokasi. Sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi. Pada kegiatan tersebut, Pokja Papua Polhcam berkoordinasi dengan beberapa Lembaga seperti Universitas Papua yang menyarankan agar ada regulasi khusus yang mengatur tentang kewenangan-kewenangan sehingga tidak terjadinya over lapping (tumpang tindih). Selain itu tata Kelola Pendidikan belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Artinya kebijakan pemerintah mesti disinergiskan dengan kebijakan daerah.



Pada tanggal 02 Juli 2025, **Sekretariat Daerah Melalui Biro Administrasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat** mengundang BP3OKP Papua Barat memberikan materi di **Focus Group Discussion (FGD)**, tentang **Fasiliasi Perumusan Kebijakan Teknik Pembangunan Daerah**, tema : **Sinkronisasi dan Kolaborasi Program Kerja Antar OPD Dalam Mendukung Pelaksanaan Otsus**. Otonomi Khusus memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan OAP yang berada di Wilayah Doberai dan Bomberay sesuai Peraturan dan Perundang-undangan sehingga **sangat penting diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih kegiatan**. Mengingat sejak tahun 2021 Dana Otsus mengalami



Pada Tanggal 7-9 Juli 2025 BP3OKP Papua Barat menghadiri undangan UPT Kemendikdasmen di Jayapura tentang Konsolidasi Regional, yaitu **Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tana Papua Tahun 2025**, dengan tema : **“Sinergi Semesta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Tanah Papua”**. Pokja Papua Polhukam menilai bahwa ada regulasi di Bidang Pendidikan yang tumpang tindih. Selain Sinkronisasi perlu penyederhanaan simplifikasi sehingga kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan dapat terarah terutama Rata-rata Lama Sekolah (RLS) maupun penyediaan sarana dan prasarana. **Ditekankan semua pelaksanaan Pendidikan dapat berjalan sebaik mungkin terutama akses layanan Pendidikan Dasar.** Selain itu Pokja Papua Polhukam menekankan belum ada regulasi yang mengatur tentang **pelaksanaan Pendidikan**. Misalnya di Papua Barat beberapa Lembaga seperti Biro Otsus, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Bappeda juga mengelola anggaran Otsus. Sehingga perlu adanya regulasi guna mengatur semua instansi yang menangani dana Otsus khususnya dibidang Pendidikan. guna mencegah tumpang tindih kegiatan. Terutama Bappeda dari sisi perencanaan sedangkan Dinas Pendidikan dari aspek pelaksanaannya.



Pada Tanggal 15 Juli 2025 bertempat di Ruang Triton GKN Manokwari, pelaksanaan **Rapat Bulanan Anggota Pokja Bersama Tim Dukungan Administratif**. Rapat tersebut membahas Overview pelaksanaan anggaran semester II Tahun anggaran 2025 yang mencapai 32,81% yang masih jauh dari target realisasi. Realisasi Sekretariat BPP MKW Semester 1 tahun 2025 masihn rendah dikarenakan antisipasi agenda strategis pada semester II Tahun 2025 yang diproyeksikan semakin banyak. **Realisasi anggaran oleh Pokja Papua Polhukam masih rendah dikarenakan hanya satu anggota Pokja yang aktif di pokja Papua Polhukam, pengunduran diri anggota Pokja atas nama Daru Cahyono dan satu anggota atas nama Jimmy Rihi Tugu masih bertugas penuh sebagai asisten wilayah teritorial Kodam XVIII Kasuari Papua Barat.** Diharapkan kegiatan SHEK berupa FGD, Sosialisasi, Bimtek dan lainnya yang saat ini minim dilakukan segera di realisasi



Selasa, 15 Juli 2025, di Ruang Kanwil Keuangan Papua Barat dilakukan pertemuan antara Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Bapak Drs. Dominggus Saiba, S.Pd.,M.Si bersama Kepala Kantor Keuangan Wilayah Provinsi Papua Barat, Bapak Muhammad Abdul Khobir serta Pimpinan dan anggota Pokja BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat. **Pertemuan tersebut membahas hambatan keterlambatan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap I Tahun Anggaran 2025.** Bupati menyampaikan kekhawatiran para kepala kampung atas belum tersalurkan dana otsus yang disebabkan oleh belum lengkapnya dokument syarat salur, terutama laporan tahunan yang menjadi dasar pencairan



Rabu, Tanggal 23 Juli 2025, dalam rangka Pembekalan terkait Monev Laporan Otsus dilaksanakan **Rapat Peningkatan Kapasitas Pokja BPP Dalam Menganalisis Laporan Tahunan Pengelolaan Dana Otsus Pemerintah Daerah.** Adapun narasumber berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan agar pemda tidak terlambat dalam menyampaikan syarat salur laporan pemenuhan anggaran Tahun 2024 kepada DJBK melalui Kanwil Perbendaharaan. Di Papua Barat belum tersalurkan Otsus 1% dikarenakan laporan Tahunan belum dilaksanakan. Selain itu Penggunaan dana Silva Otsus 1% harus dipisahkan dari penggunaan dana TKD lainnya. Sehingga diharapkan BP3OKP intens melakukan monev serta monitoring terhadap pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten terutama OPD-OPD teknis pelaksanaan program dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus.



Jumat, 25 Juli 2025 dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) tentang Pelaksanaan Pendidikan di Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala Sekolah, guru, serta badan/Lembaga unit di kabupaten Manokwari yang mengurus bidang Pendidikan. Meskipun acara kegiatan tersebut ditujukan kepada Pokja Papua Cerdas namun **Pokja Papua Polhukam turut mengambil bagian dengan melihat sisi regulasi Pendidikan di Papua Barat yang mestinya perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.** Turut hadir Rektor Universitas Papua sekaligus menjadi narasumber. **Ada beberapa masukan dari Pokja Papua Polhukam kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat agar ada penambahan, perbaikan dan peninjauan Kembali terhadap beberapa regulasi yang mengatur tentang Pendidikan di Provinsi Papua Barat. Misalnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mesti diperbaiki sesuai dengan dinamika perkembangan Pendidikan baik masyarakat maupun perkembangan pemerintahan serta tuntutan pelaksanaan Pendidikan Papua Barat. Olehnya itu BP3OKP Papua Barat, melalui Pokja Papua Polhukam merekomendasikan kurang lebih ada 15 catatan agar perlu ditinjau Kembali Perdasus serta menambahkan beberapa item tentang perbaikan regulasi tersebut.**



Selasa, 29 Juli 2025 BP3OKP Papua Barat melalui Pokja Papua Polhukam melakukan pertemuan bersama Masyarakat Adat Suku Miere yang bermukim di Wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Pertemuan tersebut membahas tentang **persoalan Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Miere dengan Pihak Perusahaan yang sudah berlarut-larut tidak pernah terselesaikan.** Perusahaan baru yang masuk sewenang-wenangnya beroperasi dengan merusak hutan milik Masyarakat Adat Suku Miere. Pihak perusahaan beroperasi masih menggunakan kontrak yang lama dan belum diperbaharui. Perusahaan tersebut belum meminta ijin kepada masyarakat adat sehingga terjadinya aksi pemalangan terhadap perusahaan. Pihak perusahaan meminta kepada Bupati Teluk Wondama untuk melakukan komunikasi dengan Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam perkembangannya nampak Gubernur Papua Barat telah meminta kepada masyarakat adat Suku Miere segera membuka palang. Persoalannya adalah Masyarakat Adat Suku Miere meminta agar pembukaan palang harus dilaksanakan secara adat. Sebab menurut pandangan mereka, palang tersebut dilakukan juga secara adat. Sehingga perlu ada tindaklanjut terhadap persoalan tersebut dengan menghadirkan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, BP3OKP Papua Barat terutama saat kunjungan kerja BP3OKP ke Kabupaten Teluk Wondama.



30 Juli 2025 bertempat di Aula KPPN Sorong dilakukan Pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BP3OKP-RI se-Tanah Papua. Dalam kegiatan tersebut KPK mendengar program yang sudah dilakukan oleh Anggota BP3OKP se-Tanah Papua dan telah disampaikan secara berurutan dari BP3OKP Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan BP3OKP Provinsi Papua Selatan. Turut memberikan pengarahan Kakanwil Keuangan Provinsi Papua Barat tentang Pelayanan Koordinasi Kerja antara Sekretariat dengan Anggota BP3OKP. KPK saat mendengar paparan dari Anggota BP3OKP telah mengetahui, bahwa belum sepenuhnya BP3OKP dalam melaksanakan fungsi SHEK. Sehingga ada banyak hal yang perlu diperbaiki. KPK berharap agar BP3OKP dalam melaksanakan fungsi SHEK tidak boleh menunggu, sebab BP3OKP sudah diberikan kewenangan yang besar. Selain itu staf KPK juga memberikan pengarahan tentang kerja-kerja nyata yang perlu dilakukan terhadap BP3OKP, meskipun BP3OKP secara maksimal sudah berupaya melaksanakan program kegiatan namun masih perlu dievaluasi. Olehnya itu dalam sesi dialog oleh masing-masing Anggota BP3OKP menyampaikan pokok persoalan yang tengah dihadapi mulai dari jumlah Anggota Pokja masih sedikit. Artinya masing-masing Anggota Pokja harus diisi sebanyak 5 (lima) orang. Anggota BP3OKP Papua Barat menyampaikan bahwa Beberapa daerah belum menyusun RAP Otsus, meski APBD telah diketok. Mandatory spending dari dana Otsus tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Diperlukan penegakan regulasi dan pelabelan/tagging dana Otsus agar keberhasilannya bisa terukur. Hal inilah yang mempengaruhi prestasi dan kinerja untuk mendorong Percepatan Pembangunan di Tanah Papua.



CAPAIAN

Pada Bulan Juli Tahun 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat mencatat sejumlah capaian kinerja strategis melalui pelaksanaan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), khususnya dalam penguatan perencanaan daerah, koordinasi strategis sesuai misi percepatan pembangunan, serta pengawasan dan harmonisasi lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Beberapa capaian BP3OKP Provinsi Papua Barat pada Bulan Juli 2025 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan perbaikan Perdasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan rekomendasi perlunya regulasi yang mengatur tentang Pendidikan gratis yang diselenggarakan pihak sekolah.
2. Adanya kesepakatan Pimpinan OPD bahwa perlu adanya koordinasi, kolaborasi secara sinergis antar semua Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Penerima Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.
3. Adanya kesepakatan yang dipandang perlu perubahan terhadap PP No 106 Tahun 2021 perlu Perbaikan Kewenangan yang mana telah ditetapkan dalam PP tersebut bahwa Kewenangan SMA/Sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten harus dikembalikan menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi
4. Melakukan Pengawasan, Pembinaan, Arahkan dan rekomendasi secara koordinatif antar Anggota BP3OKP, Kakanwil Keuangan Provinsi Papua Barat, Anggota Pokja dan Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak beserta staf pendamping dalam rangka menyelesaikan syarat salur Dana Otsus Tahun 2025.
5. Adanya kesepakatan melalui SHEK agar Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dapat dilakukan secara koordinatif, kolaboratif dengan melibatkan semua instansi terkait dan stakeholder serta diharapkan tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Otonomi Khusus harus disiapkan regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Pendanaannya.
6. Usul konkrit dari Anggota Pokja Polhukam bahwa kurang lebih ada 15 hal pokok menyangkut Pendidikan yang harus dimasukkan sesuai item atau sub judul dalam rangka revisi Perdasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua Barat.
7. Adanya kesepakatan bersama antar BP3OKP dan masyarakat Pemilik Hak Ulayat atas hutan adat agar dalam waktu dekat permasalahan hak ulayat dapat diselesaikan melalui pertemuan antar pihak Perusahaan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Wondama, Gubernur dan Bupati Teluk Wondama.
8. Mendampingi Anggota BPP untuk mendapatkan penjelasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Kapasitas dan Kualifikasi Kelembagaan dan Regulasi yang menunjang Capaian Tata Kerja yang Efisien dan Efektif dari BP3OKP dalam rangka Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
9. Kondisi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) di Provinsi Papua Barat pada bulan Juli 2025 menunjukkan dinamika yang kompleks dan menantang. Di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, berbagai persoalan keamanan dan ketegangan sosial masih terus berlangsung, khususnya akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata di wilayah-wilayah pegunungan.



REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umum berdasarkan capaian antara lain :

1. Perlu disiapkan secepat mungkin Penguatan terkait dengan Penataan Struktur Kelembagaan seperti regulasi. Artinya perlu adanya regulasi-regulasi yang menopang Pelayanan baik pelayanan Kesehatan, Pendidikan maupun regulasi yang menunjang Perekonomian terutama Papua Produktif. Sehingga diharapkan keterpaduan maupun kolaborasi, koordinasi antar Lembaga Pemerintah guna bersama-sama memberikan pemikiran tentang regulasi.
2. Diperlukan **Government Collaboration** guna menciptakan Papua Barat yang Aman, Damai dan Sejahtera serta kerja keras dan pengorbanan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita bersama.



Penutup

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua** Periode Bulan **Juli Tahun 2025** **Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)** Provinsi Papua Barat Anggota Pokja Papua Politik, Hukum dan Keamanan (Papua Polhukam).

